

Hannah Arendt dan Politik yang Bermartabat

Yosef Keladu Koten

Dalam sebuah wawancara, Günter Gaus, seorang jurnalis asal Jerman yang sangat terkenal pada waktu itu, menyebut Arendt sebagai perempuan pertama yang mengambil bagian dalam ‘*a very masculine occupation*’ yaitu menjadi seorang filsuf politik. Merasa risih dengan sebutan tersebut, Arendt mengklaim bahwa dirinya tidak termasuk dalam lingkaran para filsuf. Kalaupun harus mendeskripsikan apa yang dilakukannya selama ini, dia lebih suka disebut sebagai seorang pemikir politik. Atau, kalau ada sesuatu yang disebut dengan profesi, maka profesi yang tepat adalah teori politik dan bukannya filsafat politik.¹

Tentu saja, penolakan Arendt untuk disebut sebagai seorang filsuf bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan pengalamannya sendiri, dia mengklaim bahwa banyak filsuf profesional begitu sibuk dengan dunia atau urusan mereka sendiri atau terkungkung dalam dunia teoretis sehingga mereka kehilangan kontak dengan realitas nyata. Mereka seakan-akan terputus dari dunia manusia atau realitas yang mengelilingi mereka. Arendt beragumen bahwa berfilsafat dari dalam menara gading tidak memungkinkan para filsuf untuk memberikan perhatian serius pada realitas dunia. Akibatnya, aktivitas mereka untuk berpikir tentang dunia dan hasil dari proses pemikiran mereka tidak sungguh-sungguh merefleksikan dunia sebagaimana adanya.

Tetapi sebaliknya, dunia yang direfleksikan adalah cerminan sebuah dunia fantasi yang diciptakan dalam pikiran manusia dan tidak mempunyai hubungan dengan dunia riil. Inilah model pemikiran yang menghancurkan dunia bersama yang tercipta lewat tindakan dan pembicaraan. Arendt melihat hal ini nyata dalam diri filsuf besar yang dikaguminya, Heidegger, seorang guru dan ‘selingkuhan’nya. Dukungan Heidegger terhadap rezim Hitler yang mengusung semboyan dominasi total yang berakibat pada pembantaian orang-orang Yahudi dan pemusnahan dunia obyektif, mengindikasikan ketidakpedulian Heidegger terhadap realitas plural di sekitarnya karena kesibukan dengan kontemplasi teoretisnya.

Sekalipun Arendt secara terbuka mengklaim diri sebagai ilmuwan politik dan bukan filsuf politik, tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Margaret Hull, alasan mendasar dari tulisan-tulisannya bukan saja politis tetapi juga filosofis. Diinspirasikan oleh pengalamannya sendiri sebagai orang-orang yang termarginalisasikan dan pendidikan filosofisnya, tulisan-tulisan Arendt merefleksikan dan sekaligus menghormati pluralitas, perbedaan, kebersamaan, dan interaksi manusia. Atau, pemikiran Arendt tentang politik diinformasikan dan diarahkan kepada dunia interaksi dan perjumpaan manusiawi.

Mengeritik filsafat Barat yang terlalu menekankan diri dalam keterasingannya, Arendt menekankan pentingnya interaksi dan pluralitas. Margaret Betz Hull, dalam bukunya *The Hidden Philosophy of Hannah Arendt*, menegaskan bahwa pengakuan akan kemanusiaan sebagai sebuah pluralitas dan bahwa dunia atau politik selalu bersifat plural merupakan aspek-aspek filosofis yang tersembunyi di balik komitmen politis Arendt. Karena itu, bagi Hull, Arendt mempunyai “komitmen filosofis dan politis terhadap interaksi dan pluralitas.”²

¹ Hannah Arendt, *Essays in Understanding*, Jerome Kohn (ed.). New York: Schocken Books, 1994, hal. 1

² Margaret Betz Hull, *The Hidden Philosophy of Hannah Arendt*, London: Routledge Curzon, Taylor & Francis Group, 2002, hal. 2-3

Pluralitas dan interaksi manusia mengungkapkan keabsahan intersubjektifitas, yang bertentangan dengan universalisasi abstrak. Bagi Arendt, ada bersama dan di antara orang lain (*inter homines esse*) harus menjadi pusat dan fokus dari aktivitas berfilsafat.

Berbeda dengan berfilsafat dari menara gading, Arendt menawarkan pendekatan fenomenologis yang menuntut perhatian penuh pada fenomena yang terjadi dalam dunia. Arendt memulai analisis politik dari prioritas fenomenologis yang mengindikasikan karakter hidup manusia di dunia yang bersifat faktual dan eksperiensial. Atau dengan kata lain, dia mengadopsi metode fenomenologis dalam upaya untuk mengungkapkan struktur dasar pengalaman politis yang umum ditemukan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu, apa yang dibuat oleh Arendt adalah sebuah bentuk rehabilitasi fenomenologis terhadap dunia bersama yang merupakan dasar bagi politik.

Bertolak dari pendekatan fenomenologis terhadap politik, Arendt lalu mendiskusikan politik dalam terang ketiga struktur dasar kehidupan aktif manusia (*vita activa*) yaitu kerja, karya dan tindakan. Ketiga aktivitas ini sungguh-sungguh ada dan dialami secara kongkret dan bukannya hasil konstruksi konseptual atau abstrak atas apa yang dilakukan manusia. Arendt mengklaim bahwa di antara ketiga aktivitas manusia tersebut, hanya tindakanlah yang bersifat politis. Bahkan, tindakan diidentifikasi dengan politik, dalam arti bahwa politik adalah tindakan dan tindakan adalah politik. Itulah yang dikenal dengan teori tindakan politik.

Arendt mengemukakan dua alasan mendasar pengidentifikasian tindakan dengan politik. Alasan pertama didasarkan pada kenyataan adanya kebebasan entah dalam tindakan ataupun dalam politik. Arendt memahami kebebasan bukan sebagai kemampuan untuk memilih alternatif yang tersedia, sebagaimana dimengerti oleh tradisi liberal, atau sebagai kemampuan bebas untuk memilih (*liberum arbitrium*) yang diberikan oleh Allah seperti diajarkan oleh doktrin Kristen, tetapi kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru atau untuk melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Dan, berbeda dengan liberalisme, yang lebih berfokus pada kebebasan individual, Arendt menfokuskan diri pada kebebasan politis, yang menunjuk pada kemampuan untuk menentukan dan sekaligus menegaskan diri selalu dalam kebersamaan dengan orang lain.

Justru inilah yang ditemukan dalam tindakan. Dalam bertindak, seseorang secara bebas memperkenalkan sesuatu yang baru kepada dunia pluralitas. Arendt menulis: *To act, in its most general sense, means to take an initiative, to begin (as the Greek word archein, 'to begin', 'to lead,' and eventually 'to rule', indicates), to set something into motion...*³ Tindakan mengkarakterisasikan sebuah permulaan yang baru, sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Jadi sesuatu yang inheren dalam tindakan sebagai kemampuan untuk mengintroduksi permulaan baru adalah kebebasan. Itulah mujizat permulaan baru yang inheren dalam kelahiran.⁴

Menurut Arendt, tindakan dan kebebasan identik, dalam arti bahwa menjadi bebas berarti terlibat dalam tindakan atau mengambil inisiatif. Tindakan sebagai permulaan baru mengaktualisasikan kebebasan. Atau, kemampuan kita untuk kebebasan diekspresikan lewat

³ Hannah Arendt, *The Human Condition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1958, hal. 177

⁴ Arendt menulis: "However, of the three, action has the closest connection with the human condition of natality; the new beginning inherent in birth can make itself felt in the world only because the newcomer possesses the capacity of beginning something anew, that is, of action. Ibid., hal. 9

tindakan. “Manusia bebas (...) sejauh mereka bertindak, bukan sebelum atau sesudah; karena menjadi bebas dan bertindak adalah sama.”⁵ Seorang pribadi bebas karena dia adalah sebuah permulaan baru. Arendt melihat hubungan antara kebebasan dan tindakan, dalam arti bahwa kebebasan eksis hanya ketika manusia terlibat dalam tindakan politik; dan tindakan politik dapat terlaksana hanya kalau ada komitmen bersama terhadap dunia. Atau seperti ditegaskan oleh Kateb: “Tindakan politik mengharapkan ciptaan atau konservasi atau tambahan yang cocok dari dunia, sebuah polis atau entitas lain adalah latarbelakang dan inspirasi dan sumber makna bagi tindakan politik.”⁶

Sebagaimana tindakan, makna politik terletak dalam kebebasan. Identifikasi politik dengan kebebasan ditarik dari pemahaman Yunani tentang politik, yang terpusat sekitar kebebasan, yang dimengerti secara negatif sebagai tidak dipimpin atau memimpin dan secara positif sebagai sebuah ruang yang dapat diciptakan hanya oleh manusia dan dengannya manusia bergerak. Dalam Yunani kuno, politik diasosiasikan dengan *polis*, negara-kota; dan karena itu politik berarti apa yang termasuk dalam *polis*. Secara literal kata Yunani *polis* diambil dari kata kerja *pellein*, yang berarti “muncul dalam pergerakan sirkuler.”⁷

Hal itu berarti bahwa *polis* adalah sebuah pusat eksistensial, yang dalam dirinya tidak ada. Jadi, politik sebagai ruang di antara menyatukan pluralitas manusia di sekitar ketiadaan atau kekosongan (nothing). Yang mau ditekankan oleh Arendt di sini adalah bahwa dalam berpikir tentang politik, kita hendaknya memulai dari ketiadaan karena tidak ada satu pun yang bisa dikatakan tentang apa, bagaimana, mengapa dan kapan. Akibatnya, setiap orang bebas untuk terlibat dalam tindakan dan pembicaraan. Arendt menegaskan bahwa politik harus merupakan sebuah aktivitas terus menerus dari warga negara yang berkumpul bersama untuk melaksanakan kemampuan perwakilan, untuk mengatur hidup dalam cara pembicaraan dan persuasi yang bebas.

Di samping kebebasan, pengidentifikasian antara tindakan dan politik juga didasarkan atas kondisi pluralitas. Berbeda dengan aktivitas kerja yang berhubungan dengan proses alamiah dan keharusan mempertahankan eksistensi manusia dan karya dengan persoalan ketidakalamiah eksistensi manusia, tindakan berhubungan dengan kondisi pluralitas. Tindakan dilakukan hanya dalam kehadiran orang lain. Jadi kondisi yang ada dalam sebuah tindakan manusia adalah pluralitas.⁸ Orang tidak bisa bertindak dalam kesendirian. Kenyataannya, tindakan bergantung sepenuhnya pada kehadiran tetap orang lain dan kebersamaan seperti itu menuntut adanya sebuah ruang publik, di mana orang bertemu satu sama lain untuk bertindak. Pengidentifikasian tindakan dengan politik sangat fundamental dalam upaya untuk membangun kehidupan politik yang bermartabat.

⁵ Hannah Arendt, *Between Past and Future*, New York: The Viking Press, 1961, hal. 153

⁶ George Kateb, “Freedom and Worldliness in the Thought of Hannah Arendt,” dalam *Political Theory*, Vol. 5, No. 2, 1977, hal. 142

⁷ Mark Antaki, “What Does It Mean to Think about Politics?” Dalam *Thinking in Dark Times: Hannah Arendt on Ethics and Politics*, Roger Berkowitz, cs (eds.). New York: Fordham University Press, 2010, hal. 68-69

⁸ Menurut Arendt, aktivitas kerja (*labor*) berkaitan dengan keharusan hidup, yaitu mempertahankan hidup. Orang bekerja untuk mempertahankan hidup. Karena itu, produk dari aktivitas kerja bukanlah sesuatu yang permanen tetapi selalu dikonsumsi demi mempertahankan hidup. Dalam konteks ini dalam bekerja, manusia “diperbudak” oleh keharusan untuk mempertahankan hidup sehingga mereka tidak bebas. Ketiadaan kebebasan adalah karakteristik dari aktivitas bekerja. Sekalipun demikian, Arendt mengakui bahwa aktivitas kerja merupakan elemen konstitutif dari kondisi hidup manusia. Aktivitas karya (*work*) berkaitan fabrikasi atau pembuatan dunia artifisial. Bagi Arendt, melalui kegiatan karya, manusia menciptakan sebuah dunia yang berbeda dari dunia alamiah. Dunia ciptaan manusia ini semi-permanen dan tidak terikat dengan pembuatnya. Bdk. Arendt, *The Human Condition*, hal. 7 dan 83

Bertindak, dalam arti mengambil inisiatif, memperkenalkan sesuatu yang baru dan tak terduga kepada publik, atau melakukan terobosan-terobosan yang konstruktif adalah sesuatu yang niscaya dalam politik. Seorang politisi, khususnya para pemimpin eksekutif dalam semua tingkatan dan anggota legislatif, tidaklah cukup hanya bekerja dan berkarya. Mereka tidak boleh menjadikan jabatan politis sebagai lahan pekerjaan untuk mencari nafkah demi mempertahankan hidup. Mereka hendaknya berkarya dengan membangun infrastruktur-infrastruktur dasariah bagi warga negara untuk hidup secara layak dan sekaligus memiliki kreativitas untuk menciptakan ruang-ruang politis bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

Sebagaimana tindakan, politik juga dibangun di atas dasar pluralitas manusia dan selalu berurusan dengan “ko-eksistensi dan asosiasi dari manusia yang berbeda-beda.”⁹ Di sini, Arendt mengeritik asumsi umum sejak Aristoteles bahwa subsansi politik ditarik dari kenyataan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk politik atau ada sesuatu yang bersifat politis dalam esensi manusia. Menurut Arendt, asumsi ini keliru karena tidak ada sesuatu yang bersifat politis dalam kodrat manusia. Kenyataannya, manusia dalam dirinya sendiri adalah apolitis dan karena itu politik hanya bisa dibangun kalau manusia berinteraksi satu sama lain dalam tindakan dan pembicaraan. Politik adalah ruang di antara manusia ketika mereka berada bersama dan melakukan sesuatu secara bersama. Politik berlangsung di antara manusia-manusia dan karena itu berada di luar manusia. Arendt menulis: “*Politics arises between men and so quite outside of man. There is no real political substance. Politics arises in what lies between men and is established as relationship.*”¹⁰

Penekanan pada term ‘antara’ dan juga ‘di luar’ manusia sangat mendasar karena pengakuan akan kekhasan orang lain hanya bisa terjadi kalau ada jarak antara manusia. Ketika ada jarak, kita bisa dengan gampang melihat kekhasan dan keunikan orang lain yang bisa memperkaya kebersamaan. Lebih lanjut, politik sebagai ruang di antara memungkinkan adanya komunikasi antara warga negara. Di sini, Arendt sesungguhnya mengeritik pendapat umum yang mengatakan bahwa politik dimengerti sebagai relasi antara pemimpin yang dipimpin. Menurutnya, pendapat umum ini bersifat utopis belaka karena dalam kenyataan ada sebuah jurang yang memisahkan pemimpin dari yang dipimpin. Bahkan, jurang itu begitu lebar sehingga tidak ada ruang bagi yang dipimpin untuk mengontrol pemimpin. Karena itu, pengertian politik yang demikian melahirkan despotisme dan birokratisasi. Bagi Arendt, politik bukanlah relasi antara pemimpin dan yang dipimpin, tetapi relasi antara manusia. Sejatinya, politik adalah ‘*a web of relationship*’, sebuah jaringan relasi antara manusia atau antara warga negara karena mereka bertindak dan berkomunikasi satu sama lain.

Politik dominasi yang berakibat pada pemusnahan orang-orang Yahudi di Jerman dan kota-kota lain di Eropa tidak terlepas dari kesalahpahaman Hitler atas politik. Ketika dia secara salah memahami dirinya sebagai makhluk politik, dia terjerumus ke dalam kecenderungan fatal untuk mengidentikkan segala perkataan dan perbuatannya sendiri sebagai sesuatu yang ‘politis’ dan karena itu harus diikuti atau ditaati oleh orang lain. Dan, orang yang berpikir dan berada berbeda sebagai orang Yahudi, misalnya, dianggap apolitis sehingga layak untuk ‘dimusnahkan’ dari gelanggang politik. Ketika rezim totaliter berupaya untuk membangun kekuasaan absolut dan berkecenderungan untuk membentuk partai tunggal yang setia dan loyal hanya kepada pemimpinnya, sebagaimana dilakukan oleh Soeharto pada zaman Orde Baru, rezim seperti itu memusnahkan perbedaan dan memperlakukan warga negara semata-mata sebagai massa mengambang yang kehilangan tujuan-tujuan hidup mereka sendiri. Atau,

⁹ Hannah Arendt, *The Promise of Politics*, New York: Schocken Books, 2005, hal. 93

¹⁰ *Ibid.*, hal. 95

warga negara dianggap sebagai massa yang tidak mempunyai interese sendiri dengan konsekuensi lanjutnya adalah bahwa mereka diisolasikan sebagai sebuah kelompok dan dihancurkannya relasi manusiawi antara warga negara.

Dari perspektif Arendt, bisa dikatakan bahwa kalau politik dipahami secara benar sebagai asosiasi dari manusia yang berbeda-beda, maka perbedaan bukanlah biangkeladi perpecahan dan konflik, tetapi sebagai 'modal' berharga yang memperkaya kehidupan bersama. Dan kalau politik dimengerti sebagai 'jaringan relasi antara manusia', maka politik dominasi, monolog, 'top-down' tidak mungkin terjadi. Yang terjadi adalah sebaliknya yaitu adanya rasa respek antara pemimpin dan yang dipimpin, komunikasi atau dialog menjadi alternatif kalau ada perbedaan-perbedaan pandangan, dan tereliminasi kecenderungan elitis dan birokratis dari kalangan pemimpin dan warga negara. Atau, dengan kata lain, pemahaman yang benar tentang politik akan menghantar kita kepada praktik-praktik politik yang bermartabat. Justru inilah kontribusi utama Arendt terhadap perkembangan filsafat politik dewasa ini.

Hannah Arendt adalah seorang filsuf yang sangat menantang bagi setiap orang yang berniat mempelajari filsafat politiknya. Hal ini disebabkan karena dia tidak menulis sesuatu yang mewakili filsafat politik yang sistematis, di mana sebuah argumen utama dijelaskan dan dikembangkan secara runtut bertolak dari tema-tema umum yang selalu diasosiasikan dengan filsafat politik, seperti otoritas, negara, kekuasaan, kedaulatan, sistem pemerintahan, dan seterusnya.

Pemikiran politik Arendt bertolak dari '*thought of fragments*', pemikiran atas fragmen-fragmen atau peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di masa lalu. Seperti seorang penyelam mutiara yang menyelam ke kedalaman laut untuk melepaskan mutiara dari batu karang dan membawa mutiara ke permukaan, Arendt pun mendalami masa lampau dan membawa ke dalam dunia politik kontemporer apa yang hidup atau apa yang bertahan hidup dalam sebuah bentuk yang baru. Arendt menulis: "Peristiwa-peristiwa, masa lalu ataupun masa sekarang adalah benar, dan guru yang dapat dipercayai karena mereka adalah sumber informasi utama bagi orang yang terlibat dalam politik."¹¹

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Arendt menekankan pentingnya memperhatikan aktualitas dari peristiwa yang menampakkan diri kepada kita karena keyakinan bahwa ada sesuatu yang baru dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam dunia ini. Karena itu, kita perlu mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi atau "*to look upon the past with eyes undistracted by any tradition*" dan "*to dispose of a tremendous wealth of raw experience.*"¹² Jadi pemikiran politik Arendt diinformasikan dan dibimbing oleh keprihatinannya sendiri terhadap peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi dalam dunia politik itu sendiri. Atau seperti dikatakan oleh Margaret Canovan, pemikiran politik Arendt "didorong oleh beberapa peristiwa politik aktual dan penolakannya terhadap tradisi filsafat modern Barat yang mengabaikan pengalaman aktual dari aktor-aktor politis."¹³

¹¹ Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, New York: A Harvest Book, Harcourt Brace Company, 1951, hal. 482

¹² Hannah Arendt, *The Life of the Mind*, New York & London: A Harvest Book and Harcourt Inc., 1978, hal. 12

¹³ Margaret Canovan, *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, hal. 3

Konsekuensi logisnya adalah bahwa untuk memahami filsafat politik Arendt, kita juga harus merekonstruksinya dari ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang tercecer dalam tulisan-tulisannya. Inilah persis yang dilakukan oleh penulis buku ini. Penulis menyambut tantangan tersebut di atas dengan positif dan berupaya merumuskan konsep Arendt tentang tindakan politik dan mengaplikasikannya dalam politik Indonesia dewasa ini. Keberanian dan kecermatan penulis seperti ini patut diapresiasi. Kekuatan buku ini terletak pada analisis yang tajam dan mendalam dan sekaligus aplikasinya dalam konteks Indonesia dan karena itu buku ini layak dibaca dan dijadikan referensi untuk semua yang berniat untuk mempelajari pemikiran politik Hannah Arendt. ***

Daftar Rujukan:

- Antaki, Mark. "What Does It Mean to Think about Politics?" Dalam *Thinking in Dark Times: Hannah Arendt on Ethics and Politics*, Roger Berkowitz, cs (eds.). New York: Fordham University Press, 2010.
- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*, New York: A Harvest Book, Harcourt Brace Company, 1951.
- . *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1958.
- . *Essays in Understanding*. Jerome Kohn (ed.). New York: Schocken Books, 1994.
- . *Between Past and Future*, New York: The Viking Press, 1961.
- . *The Life of the Mind*, New York & London: A Harvest Book and Harcourt Inc., 1978.
- . *The Promise of Politics*, New York: Schocken Books, 2005
- Canovan, Margaret. *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Hull, Margaret-Betz. *The Hidden Philosophy of Hannah Arendt*. London: Routledge Curzon, Taylor & Francis Group, 2002.
- Kateb, George. "Freedom and Worldliness in the Thought of Hannah Arendt." Dalam *Political Theory*, Vol. 5, No. 2, 1977.